

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENELANTARAN
EKONOMI TERHADAP ISTRI OLEH SUAMI**



Oleh:

HATFINA AMAJIDA

NIM. 031811133018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENELANTARAN EKONOMI
TERHADAP ISTRI OLEH SUAMI

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING,



Dr. BAMBANG SUHERYADI, S.H., M.Hum.
NIP. 196809281997021001

PENYUSUN,



HATFINA AMAJIDA
NIM. 031811133018

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2022

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada tanggal 20 April 2022

Tim Penguji Skripsi:

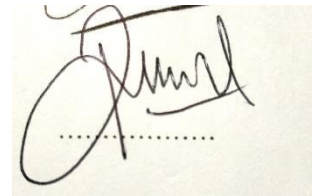
Ketua : Dr. Astutik, S.H., M.H.



Anggota : 1. Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.



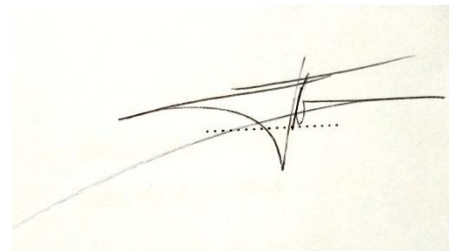
2. Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP.



3. Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H.



4. Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hatfina Amajida

NIM : 031811133018

Bidang Minat : Hukum Peradilan

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Ekonomi Terhadap Istri Oleh Suami

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 20 April 2022

Yang membuat pernyataan,



HATFINA AMAJIDA

NIM. 031811133018

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Ekonomi Terhadap Istri Oleh Suami”. Selama proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha maksimal untuk dapat menulis skripsi guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Selama proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan banyak pihak, oleh karenanya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing Penulis yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan selama proses penyelesaian skripsi;
3. Dr. Astutik, S.H., M.H., Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP., Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., Iqbal Felisiano, S.H., LL.M. selaku dosen penguji skripsi yang banyak memberi masukan dan saran selama proses penyelesaian skripsi;
4. Hanum Rahmaniar Helmi, S.H., M.H. selaku dosen wali Penulis yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan selama Penulis berkuliah;
5. Segenap Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan bantuan Penulis dalam menunjang proses pembelajaran;

6. Orang tua, adik, kakek, nenek, om, tante, budhe, pak dhe serta seluruh saudara yang senantiasa memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Vinanda, Talitha, Amel, Dinta, Dinda, Nanda, Jihan, Noering, Ervina, Namira, Quinta, Nadilla, Mbak Eva, Millen, Adeng selaku teman-teman penulis yang mendukung dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Mbak Shaviera dan Mbak Sisya yang memberikan bimbingan dan dukungan dalam tutor untuk penyelesaian skripsi ini;
9. Seluruh sahabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan banyak motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;

Penulis berharap skripsi ini dapat dipahami, dapat menjadi motivasi dan membawa manfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia. Oleh karenanya, Penulis mengharapkan kritik dan saran guna menjadikan skripsi ini lebih baik.

Penulis,



HATFINA AMAJIDA
NIM. 031811133018

Abstrak

Tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga terhadap istri pada era saat ini marak terjadi. Khususnya dalam hal ini adalah penelantaran ekonomi, yang mana hal tersebut merupakan budaya hukum masyarakat yang seringkali tidak disadari oleh istri dalam rumah tangganya dan cenderung menganggap Tindakan tersebut merupakan ranah pribadi yang mana pelakunya tidak dapat dipidana. Oleh karenanya dalam rangka penegakan hukum tindak pidana penelantaran, melihat dari substansi hukumnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT hadir guna memberikan jaminan yang akan diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam lingkup rumah tangga, selain itu terdapat beberapa peraturan perundang-undangan dan hukum nasional yang terkait erat dengan UU PKDRT. Sehingga, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Tindak pidana penelantaran ekonomi ditinjau dari peraturan perundang-undangan (2) Analisis putusan pengadilan mengenai tindak pidana penelantaran ekonomi istri oleh suami. Penelitian ini dibuat untuk mengkaji tindak pidana penelantaran ekonomi ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang terkait erat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan terkait tindak pidana penelantaran ekonomi terhadap istri. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Berdasarkan hasil analisa, diketahui bahwa dalam rangka mewujudkan penegakan hukum tindak pidana penelantaran ekonomi harus diperhatikan substansi hukum yang digunakan oleh penegak hukum dalam melakukan penerapan hukum secara menyeluruh. Kemudian secara struktur hukum, lembaga-lembaga terkait seperti kepolisian, kejaksaan dan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana penelantaran ekonomi harus memperhatikan aspek perlindungan bagi masyarakat dan korban agar tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum, manfaat dan keadilan.

Kata kunci: substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum.

Abstract

The crime of neglect in the household scope against the wife in the current era is rife. Especially in this case is economic neglect, which is the legal culture of the community which is often not realized by the wife in her household and tends to consider the action to be a private sphere where the perpetrator cannot be punished. Therefore, in the context of law enforcement of the criminal act of neglect, looking at the legal substance, Law Number 23 of 2004 concerning PKDRT is present to provide guarantees that will be given by the state to prevent violence in the household, in addition there are several laws and regulations and national law that is closely related to the PKDRT Law. Thus, the formulation of the problem in this study are: (1) The criminal act of economic neglect in terms of legislation (2) Analysis of court decisions regarding the criminal act of economic neglect of the wife by the husband. This study was made to examine the criminal act of economic neglect in terms of the laws and regulations that are closely related to Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and the judge's considerations in court decisions related to the criminal act of economic neglect of the wife. The type of research used is legal research using a statutory approach and a case approach.

Based on the results of the analysis, it is known that in order to realize the law enforcement of the criminal act of economic neglect, it is necessary to pay attention to the legal substance used by law enforcers in implementing the law as a whole. Then in the legal structure, related institutions such as the police, prosecutors and judges in deciding a case of a criminal act of economic neglect must pay attention to aspects of protection for the community and victims in order to achieve legal objectives, namely legal certainty, benefits and justice.

Keywords: *legal substance, legal structure, legal culture.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xiii
DAFTAR PUTUSAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Metode Penelitian.....	12
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	17
BAB II TINDAK PIDANA PENELANTARAN EKONOMI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	18
2.1 Pengertian Tindak Pidana Penelantaran Ekonomi.....	18
2.2 Pengaturan Tindak Pidana Terkait Penelantaran Istri di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	19

2.3 Tindak Pidana Penelantaran Ekonomi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	22
2.4 Tindak Pidana Penelantaran Ekonomi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan	35
2.5 Tindak Pidana Penelantaran Ekonomi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	39
2.6 Tindak Pidana Penelantaran Ekonomi Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (<i>Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women</i>).....	44
BAB III ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN MENGENAI TINDAK PIDANA PENELANTARAN EKONOMI ISTRI OLEH SUAMI	46
3.1 Putusan Pengadilan Nomor 455/Pid.Sus/2012/PN KPJ	46
3.2 Putusan Pengadilan Nomor 79/Pid.Sus/2016/PN UNH	53
3.3 Putusan Pengadilan Nomor 757 K/Pid.Sus/2015	60
BAB IV PENUTUP	65
4.1 Kesimpulan.....	65
4.2 Saran.....	66
DAFTAR BACAAN	67

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Bentuk Kekerasan di Ranah KDRT/Relasi Personal Tahun 2020.....2

Grafik 2. Penyebab Perceraian Menurut Kategorisasi Pengadilan Agama.....39

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277).

h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

j. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR PUTUSAN

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 757 K/Pid.Sus/2015
- b. Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 79/Pid.Sus/2016/PN Unh
- c. Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 455/Pid.Sus/2012/PN KPJ